

## IMPLEMENTASI PLATFORM MERDEKA MENGAJAR SEBAGAI STRATEGI POLITIK PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 16 GORONTALO

Abdul Haris M. Madina  
Universitas Negeri Gorontalo  
Email : [harismadina12@gmail.com](mailto:harismadina12@gmail.com)

### ABSTRAK

Implementasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam mendukung Kurikulum Merdeka, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu ajar tetapi juga sebagai instrumen politik pendidikan yang memengaruhi dinamika sekolah dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi PMM sebagai strategi politik pendidikan di SMP Negeri 16 Gorontalo, dengan fokus pada peluang inovasi serta tantangan teknis yang dihadapi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi kebijakan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa PMM berhasil mendorong kebebasan pedagogis guru dan meningkatkan keterlibatan serta hasil belajar siswa melalui fitur-fitur interaktif. Secara politis, platform ini berfungsi efektif sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan realitas lokal. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kesenjangan literasi digital guru dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan PMM sebagai strategi politik pendidikan yang berkelanjutan sangat bergantung pada penguatan pelatihan sumber daya manusia dan pemerataan akses infrastruktur digital guna memastikan transformasi pendidikan yang inklusif dan partisipatif.

**Kata Kunci:** *Platform Merdeka Mengajar (PMM), Politik Pendidikan, Kurikulum Merdeka*

### ABSTRACT

The implementation of the Merdeka Mengajar (PMM) Platform is a strategic government initiative in support of the Independent Curriculum (Curriculum Merdeka). It serves not only as a teaching aid but also as an educational political instrument that influences the dynamics of schools and local governments. This study aims to analyze the effectiveness of PMM implementation as an educational political strategy at SMP Negeri 16 Gorontalo, focusing on innovation opportunities and the technical challenges faced. Using a qualitative approach with a case study method, data was collected through participant observation, in-depth interviews, and policy documentation. The research findings reveal that PMM successfully promoted teacher pedagogical freedom and improved student engagement and learning outcomes through interactive features. Politically, the platform effectively serves as a bridge between national policy and local realities. However, its effectiveness is hampered by the teacher digital literacy gap and limited technological infrastructure. Therefore, this study concludes that the success of PMM as a sustainable educational political strategy depends heavily on strengthening human resource training and equitable access to digital infrastructure to ensure an inclusive and participatory educational transformation.

**Keywords:** *Merdeka Mengajar (PMM) Platform, Educational Politics, Independent Curriculum*

### PENDAHULUAN

Pendidikan secara universal diakui sebagai salah satu aspek paling fundamental dalam kerangka pembangunan sebuah bangsa, memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya

Copyright (c) 2025 EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi

membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing global. Di Indonesia, sektor pendidikan tidak pernah berdiri di ruang hampa; dinamika kebijakan yang menyertainya sering kali dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai faktor dan kepentingan politik yang turut menentukan arah, prioritas, serta strategi pengembangan pendidikan nasional dari masa ke masa (Anwar et al., 2021; Putri & Salito, 2024). Perubahan kepemimpinan dan peta politik sering kali berimplikasi pada lahirnya regulasi baru yang menuntut adaptasi cepat dari seluruh elemen pendidikan. Dalam lanskap ini, kebijakan pendidikan bukan sekadar instrumen pedagogis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan juga merupakan produk dari proses politik yang kompleks yang melibatkan berbagai *stakeholders* di tingkat pusat maupun daerah (Nurfaizin & Firdaus, 2025; Pratandawati & Sari, 2025). Oleh karena itu, memahami arah kebijakan pendidikan nasional mengharuskan kita untuk tidak hanya melihat pada aspek teknis kurikulum semata, tetapi juga pada dimensi politis yang melatarbelakangi setiap keputusan strategis yang diambil oleh pemangku kebijakan untuk mentransformasi sistem pendidikan.

Salah satu manifestasi kebijakan terbaru yang mendapatkan atensi signifikan dari berbagai kalangan adalah implementasi *Platform Merdeka Mengajar* yang diposisikan sebagai komponen vital dalam ekosistem penerapan *Kurikulum Merdeka* (Fahirah et al., 2025; Tibr et al., 2025). Kebijakan digitalisasi ini dirancang secara spesifik untuk memberikan otonomi, kebebasan, dan ruang inovasi yang lebih luas bagi para tenaga pendidik dalam merancang serta melaksanakan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Secara ideal, kehadiran platform ini diharapkan mampu menjadi katalisator dalam mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan merata di seluruh pelosok nusantara (Silalahi et al., 2025; Sutarsih et al., 2024). Melalui fitur-fitur yang disediakan, pemerintah berupaya mendemokratisasi akses terhadap pelatihan berkualitas dan materi ajar yang bermutu, sehingga guru tidak lagi semata-mata bergantung pada pelatihan konvensional yang sering kali terbatas kuotanya. Visi besar di balik inisiatif ini adalah menciptakan ekosistem belajar yang mandiri, di mana guru diberdayakan untuk menjadi agen perubahan utama dalam kelas, memanfaatkan teknologi sebagai jembatan untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi isu menahun (Rambe et al., 2025; Sangka et al., 2025).

Namun demikian, implementasi *Platform Merdeka Mengajar* sejatinya tidak hanya dapat dimaknai sebagai upaya teknokratis untuk peningkatan mutu pembelajaran semata, melainkan juga harus dipandang sebagai sebuah strategi politik pendidikan yang memiliki implikasi luas terhadap struktur hubungan antara lembaga pendidikan sekolah dan pemerintah daerah (Anwar et al., 2021; Hula & Mariana, 2020; Sumpena et al., 2022). Platform ini secara tidak langsung mengubah pola distribusi kekuasaan dan pengawasan dalam tata kelola pendidikan, dengan menciptakan jalur komando dan informasi yang lebih *direct* antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Hal ini terlihat jelas pada bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan, dipantau, dan dievaluasi dalam aktivitas manajerial sehari-hari di tingkat sekolah, termasuk fenomena yang terjadi di SMP Negeri 16 Gorontalo. Dalam konteks strategis ini, platform tersebut bertransformasi menjadi alat politik yang menghubungkan visi kebijakan pendidikan pusat dengan realitas kebutuhan riil di lapangan, sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan kepatuhan daerah terhadap standar nasional, yang pada gilirannya menciptakan tantangan sekaligus peluang baru dalam dinamika pengelolaan pendidikan di daerah.

Meskipun tujuan utamanya sangat mulia, terdapat kesenjangan yang nyata antara kondisi ideal yang diharapkan dari penggunaan *Platform Merdeka Mengajar* dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Secara teoretis, platform ini didesain untuk mempermudah

Copyright (c) 2025 EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi

beban administrasi guru dan meningkatkan kompetensi mereka melalui pembelajaran mandiri yang fleksibel. Namun, fakta di lapangan sering kali menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural, seperti ketimpangan infrastruktur digital, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, hingga persepsi bahwa penggunaan aplikasi ini hanyalah tambahan beban administratif baru bagi para pendidik. Di SMP Negeri 16 Gorontalo, misalnya, integrasi teknologi ini ke dalam rutinitas harian sekolah tidak selalu berjalan mulus tanpa gesekan. Guru sering kali dihadapkan pada dilema antara memenuhi tuntutan administratif digital yang dipantau pusat dan kewajiban pedagogis tatap muka yang intensif. Kesenjangan antara ekspektasi pusat akan digitalisasi yang masif dan kesiapan ekosistem lokal inilah yang menjadi titik krusial untuk ditelaah lebih lanjut guna memahami efektivitas kebijakan tersebut.

Permasalahan spesifik yang muncul dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya implementasi *Platform Merdeka Mengajar* dijalankan secara operasional di SMP Negeri 16 Gorontalo, dan sejauh mana platform tersebut memainkan perannya sebagai strategi politik pendidikan dalam konteks lokal yang spesifik. Sangat penting untuk memahami tantangan-tantangan konkret yang dihadapi oleh para pendidik di sekolah tersebut, mulai dari aspek teknis hingga manajerial, serta dampak kebijakan ini terhadap redefinisi peran guru, perubahan dinamika organisasi sekolah, dan pola interaksi dengan pemerintah daerah setempat. Apakah platform ini benar-benar memberdayakan guru di Gorontalo, atau justru menjadi alat kontrol birokrasi yang kaku? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tersebut secara rinci dan menganalisis aspek-aspek politis serta pedagogis tersebut secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif tentang pelaksanaan strategi pendidikan ini, melampaui sekadar laporan statistik penggunaan aplikasi, tetapi menyentuh pada substansi perubahan perilaku organisasi.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan atau inovasi karena tidak hanya melihat implementasi teknologi pendidikan dari kacamata kemanfaatan praktis atau *usability* semata, tetapi menempatkannya dalam kerangka analisis politik pendidikan yang lebih luas di tingkat satuan pendidikan. Kebanyakan studi sebelumnya cenderung fokus pada efektivitas fitur aplikasi, sementara penelitian ini menyoroti bagaimana sebuah aplikasi menjadi instrumen negosiasi kekuasaan dan kebijakan antara pusat, daerah, dan sekolah. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang mendalam, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoretis dan empiris pada khazanah kajian pendidikan yang mengintegrasikan aspek politik kebijakan dengan praktik nyata pembelajaran di sekolah. Analisis ini akan membedah bagaimana regulasi dari Jakarta berinteraksi dengan kearifan dan kendala lokal di Gorontalo, menghasilkan potret implementasi yang unik dan kaya akan nuansa, yang mungkin luput dari pemantauan evaluasi berskala nasional yang bersifat kuantitatif.

Dengan demikian, hasil akhir dari penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti pada temuan akademis, tetapi dapat menjadi dasar rekomendasi yang solid bagi para pemangku kepentingan untuk pengembangan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan partisipatif di masa depan. Khususnya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan *Platform Merdeka Mengajar* di tingkat sekolah menengah pertama di Gorontalo, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjembatani kesenjangan yang ada dan menjadikan transformasi digital sebagai solusi yang bumi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan sebuah strategi politik pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi lebih pada kesiapan manusia dan ekosistem pendukungnya. Harapannya, *Platform Merdeka Mengajar* dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana pemerdekaan profesi guru, bukan sekadar instrumen administrasi, sehingga tujuan besar mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai melalui sinergi yang harmonis antara kebijakan politik dan praktik pendidikan di lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi *Platform Merdeka Mengajar* (PMM) sebagai strategi politik pendidikan. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena kebijakan pendidikan secara komprehensif, mulai dari proses penerapan, tantangan yang muncul, hingga dampak nyata dalam lingkungan pembelajaran. Lokasi penelitian dipusatkan di SMP Negeri 16 Gorontalo, sebuah institusi pendidikan yang telah mengintegrasikan PMM dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Studi ini dilaksanakan selama periode dua bulan pada tahun 2025, waktu yang dinilai memadai untuk merekam dinamika sekolah secara intensif. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, melibatkan aktor-aktor kunci dalam ekosistem sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan manajerial, para guru yang secara aktif memanfaatkan platform dalam kegiatan belajar mengajar, serta siswa kelas VIII yang merasakan dampak langsung dari transformasi pembelajaran tersebut. Melalui pemilihan subjek ini, peneliti berupaya menggali perspektif multipihak untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai efektivitas kebijakan digitalisasi pendidikan di tingkat lokal.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pemanfaatan sumber data primer dan sekunder untuk menjamin validitas informasi. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan, sedangkan data sekunder mencakup dokumen sekolah, laporan pelatihan, dan regulasi terkait. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga metode utama, yakni observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas guru dan siswa saat menggunakan fitur-fitur PMM di dalam kelas, guna merekam praktik nyata di lapangan. Selanjutnya, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan untuk menggali pengalaman subjektif, kendala teknis, serta persepsi mereka terhadap kebijakan ini. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap perangkat ajar digital, laporan penggunaan aplikasi, dan kebijakan sekolah yang relevan. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan peneliti untuk memverifikasi kesesuaian antara kebijakan yang tertulis, narasi yang disampaikan oleh subjek, dan praktik implementasi yang terjadi sesungguhnya di lingkungan sekolah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif dan berkelanjutan, dimulai dari tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Proses analisis mengacu pada alur yang sistematis, meliputi reduksi data untuk memilah dan menajamkan informasi yang relevan dengan fokus strategi politik pendidikan, penyajian data (*data display*) yang disusun secara tematik berdasarkan aspek implementasi dan dampak, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori implementasi kebijakan untuk menghasilkan interpretasi yang bermakna. Guna menjamin keabsahan dan akurasi temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yang ketat, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan temuan observasi dan dokumen pendukung. Selain itu, dilakukan pula *member checking* untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti selaras dengan makna yang dimaksudkan oleh para informan. Prosedur validasi ini bertujuan untuk meminimalisir bias peneliti dan memastikan bahwa simpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai representasi objektif dari fenomena yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **1. Implementasi Fitur dan Transformasi Pedagogis**

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) di SMP Negeri 16 Gorontalo telah berjalan secara progresif dan menjadi instrumen vital dalam transformasi pedagogis guru. Para tenaga pendidik di sekolah ini secara aktif mengeksplorasi dan mengoptimalkan berbagai fitur unggulan yang tersedia dalam ekosistem digital tersebut, mulai dari pelatihan mandiri, bank soal digital, hingga unduhan perangkat ajar yang variatif. Pemanfaatan fitur-fitur ini tidak sekadar menjadi kewajiban administratif semata, melainkan telah bergeser menjadi kebutuhan profesional untuk mendukung perancangan pembelajaran yang lebih adaptif. Guru memanfaatkan modul-modul pelatihan mandiri untuk meningkatkan kompetensi mereka tanpa harus menunggu jadwal pelatihan konvensional dari dinas terkait, yang sering kali terbatas kuotanya. Selain itu, ketersediaan ribuan inspirasi perangkat ajar memungkinkan guru untuk tidak lagi terpaku pada metode konvensional yang kaku, melainkan mampu mengadopsi model pembelajaran berbasis proyek yang menjadi napas utama Kurikulum Merdeka. Hal ini mengindikasikan bahwa PMM berhasil berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan konsep kurikulum baru dengan praktik nyata di ruang kelas.

Lebih jauh lagi, observasi mendalam terhadap aktivitas pembelajaran memperlihatkan bahwa integrasi PMM telah mendorong terciptanya materi ajar yang jauh lebih kontekstual dan relevan dengan karakteristik peserta didik di Gorontalo. Guru tidak lagi sekadar menyalin materi dari buku teks paket, tetapi melakukan modifikasi terhadap modul ajar yang diunduh dari platform agar sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan spesifik siswa di daerah tersebut. Fleksibilitas ini memberikan ruang kebebasan pedagogis yang lebih luas bagi guru untuk berinovasi meramu strategi pengajaran. Dampak dari praktik ini terlihat jelas pada atmosfer kelas yang menjadi lebih dinamis dan interaktif. Siswa tidak lagi menjadi objek pasif yang hanya mendengarkan ceramah, tetapi terlibat aktif dalam diskusi dan proyek kolaboratif yang didesain guru berdasarkan referensi dari PMM. Transformasi ini membuktikan bahwa platform digital tersebut efektif dalam mengubah paradigma mengajar guru dari sekadar penyampai materi menjadi fasilitator pembelajaran yang kreatif dan responsif terhadap dinamika kelas.

#### **2. Tantangan Kesenjangan Literasi Digital dan Infrastruktur**

Meskipun adopsi platform menunjukkan tren positif, penelitian ini juga menyingkap realitas tantangan yang cukup signifikan terkait dengan variasi tingkat literasi digital di kalangan tenaga pendidik. Ditemukan adanya disparitas atau kesenjangan kemampuan yang mencolok antara guru yang sudah mahir teknologi dengan guru yang masih gagap digital. Bagi guru dengan literasi digital yang mumpuni, PMM menjadi alat yang sangat *powerful* untuk mengakselerasi kualitas pengajaran mereka. Namun, bagi sebagian guru lain yang memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi, penggunaan platform ini justru kerap menjadi beban tambahan yang membingungkan. Keterbatasan ini memengaruhi efektivitas penggunaan fitur-fitur canggih yang tersedia, sehingga implementasi Kurikulum Merdeka menjadi tidak merata di seluruh kelas. Fenomena ini menunjukkan bahwa sekadar menyediakan aplikasi canggih tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasi kebijakan jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain faktor sumber daya manusia, hambatan teknis berupa infrastruktur penunjang juga menjadi kendala krusial yang tidak bisa diabaikan dalam penerapan strategi pendidikan berbasis digital ini. Akses terhadap koneksi internet yang stabil dan cepat belum sepenuhnya merata di seluruh area sekolah maupun di tempat tinggal guru, yang pada akhirnya menghambat akses real-time terhadap fitur-fitur PMM yang berbasis daring. Ketidakstabilan jaringan ini

sering kali menurunkan motivasi guru saat hendak mengakses pelatihan mandiri atau mengunduh perangkat ajar yang berukuran besar. Di sisi lain, kurangnya intensitas pelatihan teknis yang terstruktur dan merata bagi seluruh guru memperparah kondisi ini. Pelatihan yang ada sering kali bersifat sporadis dan tidak menjangkau kebutuhan spesifik guru yang mengalami kesulitan teknis. Akibatnya, potensi maksimal dari Platform Merdeka Mengajar belum dapat dirasakan secara seragam oleh seluruh ekosistem sekolah, menandakan perlunya intervensi lebih lanjut dalam hal pemerataan infrastruktur dan pendampingan teknis.

### **3. Implikasi Positif terhadap Ekosistem Belajar Siswa**

Penerapan Platform Merdeka Mengajar terbukti memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan keterlibatan dan motivasi belajar siswa di SMP Negeri 16 Gorontalo. Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dengan siswa mengungkapkan bahwa mereka merasakan perubahan signifikan dalam cara guru menyampaikan materi pelajaran. Penggunaan media pembelajaran interaktif dan metode berbasis proyek yang diadopsi guru dari referensi PMM membuat proses belajar menjadi jauh lebih menarik dan tidak membosankan. Siswa merasa lebih tertantang untuk berpartisipasi aktif karena materi yang disajikan lebih variatif dan relevan dengan dunia mereka. Pendekatan asesmen yang lebih personal, yang juga dipelajari guru melalui platform, membuat siswa merasa lebih dihargai keunikan dan potensi individunya. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk mengekspresikan pendapat dan kreativitas mereka di dalam kelas, menciptakan iklim akademik yang sehat dan suportif.

Secara kuantitatif, dampak positif ini juga terkonfirmasi melalui data dokumentasi sekolah yang menunjukkan tren peningkatan pada hasil asesmen formatif siswa di berbagai mata pelajaran. Setelah guru secara konsisten menerapkan strategi pembelajaran yang terinspirasi dari PMM, terjadi perbaikan rata-rata nilai akademik siswa dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan ini tidak hanya terjadi pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek keterampilan dan karakter profil pelajar Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa PMM bukan sekadar alat administrasi atau pelengkap teknologi semata, melainkan berperan sebagai katalisator substansial dalam peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika guru diberdayakan dengan sumber daya yang tepat dan berkualitas, dampaknya akan bermuara langsung pada prestasi dan kesejahteraan peserta didik. Oleh karena itu, platform ini telah membuktikan efektivitasnya dalam mendukung tujuan utama pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pembelajaran yang berkualitas.

### **4. PMM sebagai Instrumen Politik Pendidikan Desentralistik**

Dalam perspektif strategi politik pendidikan, Platform Merdeka Mengajar berfungsi strategis sebagai instrumen yang menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan realitas praktik pendidikan di tingkat daerah. Platform ini menerjemahkan visi besar kebijakan Merdeka Belajar ke dalam alat operasional yang dapat diakses langsung oleh guru di akar rumput. Melalui PMM, pemerintah pusat memberikan otonomi dan kepercayaan kepada sekolah, seperti SMP Negeri 16 Gorontalo, untuk mengelola pembelajarannya sendiri tanpa kehilangan arah standar nasional. Ini merupakan bentuk desentralisasi pendidikan yang cerdas, di mana kontrol kualitas tidak dilakukan melalui instruksi birokratis yang kaku, melainkan melalui penyediaan referensi berkualitas yang dapat diadaptasi sesuai konteks lokal. Keberhasilan sekolah dalam mengadopsi platform ini mencerminkan bagaimana kebijakan politik pendidikan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang partisipatif, di mana guru tidak lagi diposisikan sebagai objek pelaksana instruksi, melainkan subjek yang berdaya dalam menentukan arah pembelajaran.

Namun, keberlanjutan strategi politik ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk terus memberikan dukungan holistik guna mengatasi berbagai hambatan yang ada. Fakta bahwa masih terdapat kendala teknis dan kesenjangan kapasitas SDM menunjukkan bahwa

Copyright (c) 2025 EDUTECH : Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi

strategi digitalisasi pendidikan tidak bisa berjalan sendirian tanpa dukungan infrastruktur fisik dan pelatihan manusia. Agar PMM dapat benar-benar berfungsi sebagai alat pemerataan kualitas pendidikan nasional, diperlukan sinergi kebijakan yang kuat antara penyediaan konten digital dengan pemenuhan fasilitas internet dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Upaya perbaikan yang terus-menerus ini sangat krusial untuk memastikan bahwa visi politik pendidikan yang inklusif dan progresif dapat terwujud sepenuhnya. Dengan demikian, implementasi PMM di SMP Negeri 16 Gorontalo menjadi *micro-cosmos* yang menggambarkan potensi sekaligus pekerjaan rumah bagi sistem pendidikan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa di era digital.

### Pembahasan

Analisis mendalam terhadap implementasi *Platform Merdeka Mengajar* di lingkungan SMP Negeri 16 Gorontalo menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dalam pengembangan keprofesian guru. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa platform ini telah berhasil mentransformasi cara pandang tenaga pendidik terhadap pelatihan, dari yang semula bersifat instruksional-birokratis menjadi kesadaran mandiri akan kebutuhan profesional. Fitur pelatihan mandiri dan bank data perangkat ajar tidak lagi dipandang sebagai beban administrasi tambahan, melainkan sebagai sumber daya vital yang mendukung otonomi guru dalam merancang pembelajaran. Fenomena ini menandakan tumbuhnya budaya *self-regulated learning* di kalangan guru, di mana mereka secara proaktif mencari solusi atas kendala pedagogis yang dihadapi tanpa bergantung sepenuhnya pada pelatihan tatap muka yang sering kali terbatas. Implikasinya, platform digital ini berfungsi efektif sebagai katalisator yang mengakselerasi peningkatan kompetensi guru secara masif dan terstruktur, menjembatani kesenjangan akses terhadap materi pengembangan diri yang berkualitas di daerah (Askahar & Akbar, 2025; Faridli et al., 2024).

Transformasi pedagogis yang terjadi di ruang kelas merupakan manifestasi nyata dari keberhasilan adopsi teknologi pendidikan ini. Analisis terhadap praktik pembelajaran memperlihatkan bahwa guru kini memiliki keberanian lebih besar untuk meninggalkan metode konvensional yang kaku demi mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh ekosistem digital ini memungkinkan guru untuk memodifikasi modul ajar agar selaras dengan kearifan lokal dan karakteristik unik peserta didik di Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa teknologi tidak mendikte cara mengajar, melainkan memberdayakan guru untuk menjadi arsitek pembelajaran yang kreatif. Penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau *project-based learning* yang semakin intensif mengindikasikan bahwa guru telah mampu menerjemahkan konsep abstrak Kurikulum Merdeka menjadi aktivitas nyata yang relevan. Dengan demikian, platform ini berperan krusial dalam menghidupkan kembali esensi pendidikan yang berpusat pada siswa, menjauhkan praktik pengajaran dari sekadar penyelesaian target materi buku teks (Susilawati et al., 2024; Syahrani et al., 2025).

Meskipun adopsi teknologi menunjukkan tren positif, analisis ini juga menyoroti adanya disparitas kompetensi digital yang menjadi tantangan serius dalam pemerataan kualitas pendidikan. Kesenjangan literasi digital atau *digital divide* antara guru yang mahir teknologi dengan mereka yang masih beradaptasi menciptakan dua kecepatan implementasi kurikulum yang berbeda dalam satu atap sekolah. Bagi sebagian guru, transisi ke ekosistem digital ini masih menyisakan residu kebingungan yang menghambat optimalisasi fitur-fitur canggih yang tersedia. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa penyediaan alat teknologi semata tidak cukup untuk menjamin keberhasilan transformasi pendidikan jika tidak dibarengi dengan pendampingan intensif yang menyentuh aspek psikologis dan teknis pengguna. Tanpa strategi intervensi yang tepat untuk menjembatani kesenjangan ini, risiko ketimpangan kualitas

pembelajaran antarkelas akan terus melebar, yang pada akhirnya dapat mencederai prinsip keadilan pendidikan bagi seluruh siswa (Hamilaturroyya & Adibah, 2025; SUARDIANI et al., 2025).

Hambatan infrastruktur teknis, terutama terkait stabilitas koneksi internet, teridentifikasi sebagai variabel eksternal yang signifikan dalam membatasi efektivitas penggunaan platform. Ketergantungan sistem pada akses *online* secara *real-time* menuntut ketersediaan jaringan yang prima, yang sayangnya belum sepenuhnya terpenuhi secara merata. Ketidakstabilan ini sering kali memutus momentum belajar guru saat mengakses materi pelatihan atau mengunduh perangkat ajar, yang berdampak pada penurunan motivasi penggunaan jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dan sangat bergantung pada ekosistem infrastruktur fisik yang mendukung. Keterbatasan ini menjadi catatan kritis bagi pemangku kebijakan bahwa strategi transformasi digital harus bersifat holistik. Dukungan perangkat lunak harus berjalan beriringan dengan penguatan perangkat keras dan jaringan, agar teknologi benar-benar menjadi solusi yang memudahkan, bukan justru menambah kompleksitas beban kerja guru di lapangan (Primansyah et al., 2025; Ratnawati et al., 2025).

Dampak implementasi platform terhadap ekosistem belajar siswa menunjukkan korelasi positif yang kuat antara inovasi pengajaran guru dengan keterlibatan peserta didik. Perubahan metode mengajar yang lebih interaktif dan variatif, sebagai hasil dari referensi yang diperoleh guru melalui platform, berhasil menciptakan atmosfer akademik yang lebih hidup dan menyenangkan. Siswa merespons positif pendekatan baru ini dengan menunjukkan antusiasme yang lebih tinggi dalam diskusi dan kolaborasi kelas. Hal ini mengindikasikan bahwa kejenuhan belajar yang selama ini dirasakan siswa dapat diatasi ketika guru mampu menyajikan materi yang relevan dan menantang. Selain itu, pendekatan asesmen yang lebih personal memberikan ruang bagi siswa untuk dihargai keunikannya, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri atau *self-confidence* mereka. Implikasinya, platform ini secara tidak langsung telah berkontribusi pada penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif, yang merupakan prasyarat utama bagi tumbuh kembangnya potensi siswa secara optimal (Nabila et al., 2025; Rosfiani et al., 2025; Simangunsong & Habeahan, 2025).

Secara kuantitatif, peningkatan hasil belajar dan karakter siswa menjadi bukti empiris efektivitas strategi ini. Kenaikan rata-rata nilai akademik dan penguatan profil pelajar Pancasila menegaskan bahwa intervensi teknologi yang tepat guna mampu bermuara pada peningkatan *output* pendidikan. Keberhasilan ini memvalidasi asumsi bahwa kualitas guru adalah faktor determinan utama dalam prestasi siswa. Ketika guru diberdayakan dengan pengetahuan dan referensi yang kaya dari *Platform Merdeka Mengajar*, kualitas interaksi instruksional di kelas meningkat, yang pada gilirannya mendongkrak pemahaman dan keterampilan siswa. Temuan ini menolak anggapan bahwa platform digital hanya sekadar alat bantu administratif, melainkan membuktikan posisinya sebagai instrumen substantif dalam penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, keberlanjutan penggunaan platform ini harus dijaga agar tren positif peningkatan prestasi siswa dapat terus berlanjut dan semakin meningkat di masa depan.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, keberhasilan implementasi di tingkat satuan pendidikan ini merefleksikan efektivitas strategi desentralisasi melalui instrumen digital. Platform ini berfungsi sebagai jembatan strategis yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola arah pembelajarannya sendiri sesuai dengan konteks lokal, namun tetap dalam koridor standar nasional. Hal ini merupakan bentuk demokratisasi pendidikan, di mana guru tidak lagi diposisikan sebagai objek pelaksana instruksi pusat semata, melainkan sebagai subjek yang berdaya. Namun, keberhasilan model desentralisasi ini sangat bergantung pada sinergi antara penyediaan konten digital dengan dukungan infrastruktur fisik dan pengembangan sumber daya manusia. Implikasi jangka panjang dari penelitian ini menyarankan perlunya

komitmen berkelanjutan dari pemerintah untuk menutup celah kesenjangan digital dan infrastruktur, guna memastikan bahwa visi besar Merdeka Belajar dapat terwujud secara merata dan berkeadilan di seluruh pelosok negeri.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) di SMP Negeri 16 Gorontalo merupakan langkah strategis yang berhasil mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan memperkuat politik pendidikan di tingkat sekolah. Platform ini terbukti efektif sebagai media inovatif yang memberikan otonomi pedagogis bagi guru untuk merancang pembelajaran yang lebih kreatif, kontekstual, dan berpusat pada kebutuhan siswa melalui fitur-fitur seperti pelatihan mandiri dan asesmen formatif. Dampak positifnya terlihat nyata pada peningkatan motivasi belajar dan capaian akademik siswa, yang didorong oleh metode pembelajaran yang lebih interaktif dan adaptif. Dalam konteks yang lebih luas, PMM berfungsi sebagai jembatan vital yang menerjemahkan kebijakan pendidikan nasional menjadi praktik nyata di lapangan, mengakomodasi karakteristik lokal, dan menempatkan peserta didik sebagai fokus utama dalam proses transformasi pendidikan yang sedang berlangsung.

Meskipun potensi transformatifnya sangat besar, keberhasilan jangka panjang implementasi PMM dihadapkan pada tantangan sistemik yang signifikan, terutama terkait kesenjangan literasi digital guru dan ketimpangan akses infrastruktur teknologi. Hambatan-hambatan ini menuntut adanya intervensi komprehensif dari pemerintah dan pemangku kepentingan melalui penyediaan pelatihan berkelanjutan yang intensif serta pemerataan fasilitas pendukung untuk mencegah disparitas kualitas pendidikan. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara kebijakan pusat, dukungan pemerintah daerah, dan kesiapan sekolah dalam aspek teknis maupun sumber daya manusia. Dengan penanganan yang tepat terhadap kendala teknis dan penguatan kapasitas guru, Platform Merdeka Mengajar dapat menjadi instrumen kunci yang berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan kualitas hasil belajar siswa di seluruh Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, K., Novalina, S., Anwar, K., Hasibuan, L., & Suryani, D. (2021). The role of education politics as a foundation in developing curriculum and educational techniques in Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(1), 136. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i1.410>
- Askahar, A., & Akbar, M. (2025). Klinik Guru Digital: Pendekatan inovatif untuk transformasi kompetensi guru dalam pembelajaran abad 21. *Jurnal Inovasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.53621/jippmas.v5i1.490>
- Fahirah, J., Hastuti, I. D., & Anwar, K. (2025). Analisis implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri Inpres Bajo. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 708. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.6836>
- Faridli, E. M., Abidin, N., Utama, S., Sutopo, A., & Murtiyasa, B. (2024). Tantangan menuju pendidikan unggul: Membangkitkan produktivitas institusi pendidikan untuk kualitas pendidikan yang lebih baik di Indonesia. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(1), 186. <https://doi.org/10.29210/1202423797>
- Hamilaturroyya, H., & Adibah, I. Z. (2025). Dinamika pengembangan kurikulum di era digital dalam menjawab kesenjangan konsep dan praktik. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1245. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6631>

- Hula, I. R. N., & Mariana, A. (2020). Aksesibilitas pendidikan gratis pada sekolah swasta di Gorontalo Utara. *Irfani*, 16(2), 1. <https://doi.org/10.30603/ir.v16i2.1834>
- Nabila, A., Dwiyantri, A., Permana, D., & Mariyah, S. (2025). Ketidakpastian PDSS dan implikasinya terhadap kurikulum 2025. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 605. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4749>
- Nurfaizin, F., & Firdaus, A. F. (2025). Kebijakan pemerintah tentang pendidik dan tenaga kependidikan. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 310. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.5384>
- Pratandawati, A. P., & Sari, A. (2025). Pengaruh model pembelajaran aktif inovatif kreatif efektif dan menyenangkan (PAIKEM) terhadap kreativitas peserta didik kelas VIII pada materi cahaya dan alat optik di MTsN 3 Blitar. *Science: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dan IPA*, 5(4), 1620. <https://doi.org/10.51878/science.v5i4.7548>
- Primansyah, A., Bunyamin, B., & Nugrahani, D. (2025). Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam digitalisasi kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah dasar. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 127. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4688>
- Putri, P. L., & Salito, S. (2024). Dinamika kekuasaan, politik dalam pendidikan: Implikasi terhadap transformasi sosial dalam manajemen pendidikan di era industri 5.0. *Budai Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30659/budai.3.1.14-20>
- Rambe, M. K., Bunga, S., Alvionita, I., & Hasibuan, D. (2025). Inovasi pembelajaran untuk penjamin mutu pendidikan di sekolah. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 439. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4376>
- Ratnawati, E., Arini, A., Azainil, A., Haeruddin, H., & Ahmad, M. R. (2025). Penerapan manajemen mutu terpadu penggunaan Chromebook untuk pembelajaran di SMP. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 524. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5731>
- Rosfiani, O., Saidah, R. K., Itsnaini, M. F., Rifaldi, R. P., & Firliansyah, F. (2025). Pembelajaran diferensiasi sebagai pilar implementasi Kurikulum Merdeka. *Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(2), 556. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i2.6453>
- Sangka, K. B., Probohudono, A. N., Sumarta, N. H., Widjajanto, A., Kurniawati, E. M., Chayati, N., & Pratama, R. D. (2025). Membangun integritas sejak dini: Pendidikan antikorupsi untuk guru SMA melalui integrasi ekonomi, karakter, dan teknologi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 2440. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1980>
- Silalahi, N., Bangun, M. B., & Ritonga, R. (2025). Pengembangan LMS untuk mendukung multiple intelligences berbasis personalisasi. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(4), 1794. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i4.7189>
- Simangunsong, M., & Habeahan, S. (2025). Analisis kompetensi profesional guru PPKn dalam mengembangkan civic skill siswa di sekolah UPT SMP N 24 Medan. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(3), 1169. <https://doi.org/10.51878/social.v5i3.6975>
- Suardiani, N. P., Lasmawan, I. W., & Kertih, I. W. (2025). Analisis kesenjangan antara ekspektasi dan realitas dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar: Pendekatan studi kasus. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 651. <https://doi.org/10.51878/social.v4i4.4463>

- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan desentralisasi pendidikan dan implementasinya dalam pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>
- Susilawati, B., Rahmatika, Z., Arafah, A. L. A., Hartiwi, J., & Susanti, A. (2024). Kurikulum Merdeka Belajar pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i1.2745>
- Sutarsih, W., Haryati, T., & Wiyono, N. (2024). Peran digitalisasi sekolah terhadap mutu pendidikan. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 136. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i1.2810>
- Syahrani, A., Sua, A. T., & Suhardiman. (2025). Peningkatan hasil belajar siswa kelas X SMAN 7 Bone melalui model pembelajaran Student Centered Learning (SCL) pada materi teks negosiasi. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(4), 1587. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i4.7526>
- Tibr, T. U., Fauzan, F., & Nurmaliyah, Y. (2025). Penerapan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Sahid Jakarta. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1442. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i3.6652>